

DARI MEUSEURAYA HINGGA MASOHI: MENGHIDUPKAN KEARIFAN LOKAL DALAM REHABILITASI BENCANA

DITUJUKAN KEPADA:

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS,
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Tim Penulis:

Miftahul Heldra Sandiza, Joana Kriskinantyas Rahayu, Dewi Sartika

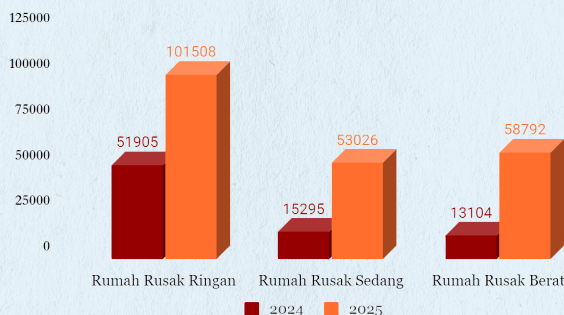
EXECUTIVE SUMMARY

Rehabilitasi pasca bencana di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa lemahnya kolaborasi lintas aktor, belum terintegrasinya kearifan lokal, serta terbatasnya kapasitas mediasi konflik di tingkat daerah. Kebijakan yang selama ini berfokus pada pemulihan fisik belum sepenuhnya menjawab persoalan sosial seperti distribusi bantuan, relokasi, dan marginalisasi kelompok rentan. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif melalui Community-Based Post-Disaster Rehabilitation Program (CB-PDRP) yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dengan dukungan pemerintah, serta Dialogue for Peace yang memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam mediasi konflik dan dialog sosial. Dengan menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah serta mengintegrasikan kearifan lokal, diharapkan rehabilitasi pasca bencana dapat menghasilkan pemulihan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi bencana di masa depan.

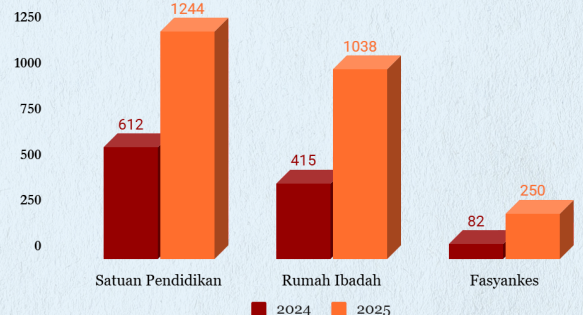
PENDAHULUAN

Selama ini, kebijakan rehabilitasi pasca bencana lebih berorientasi pada pemulihan fisik dan infrastruktur (Syugiarto, 2024), namun belum sepenuhnya menjawab persoalan sosial seperti konflik distribusi bantuan (Detik, 2025), sengketa relokasi (Kompas, 2025), dan marginalisasi kelompok rentan (Setiawan, 2024).

Perbandingan Dampak Kerusakan Pasca Bencana (Rumah)



Perbandingan Dampak Kerusakan Pasca Bencana (Fasilitas)



Data BNPB menunjukkan eskalasi dampak bencana dengan jutaan pengungsi dan kerusakan fisik yang terus meningkat, sejalan dengan banjir bandang, longsor, dan gempa bumi yang menimbulkan kerugian sosial-ekonomi besar (BNPB Indonesia, 2025). Penelitian Brancati (2007) menegaskan adanya korelasi antara bencana besar dan peningkatan risiko konflik sosial, sementara World Disasters Report (IFRC, 2018) menekankan pentingnya kepercayaan sosial dalam mencegah konflik distribusi bantuan.



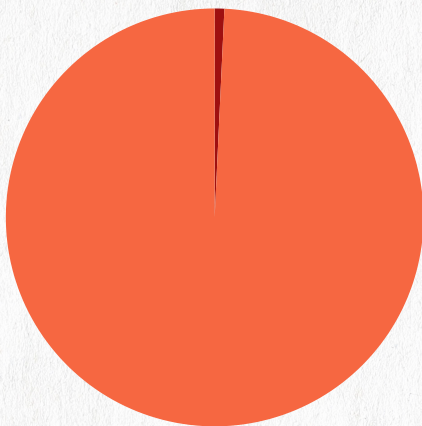
Fakta ini menunjukkan bahwa bencana bukan hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga mengancam kohesi sosial masyarakat. Pendekatan teknokratis yang berfokus pada infrastruktur dan sistem formal sering kali tidak mampu menjawab kebutuhan sosial di lapangan. Studi Giuliani dkk. menyoroti bahwa proyek-proyek besar yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur justru menghadapi tantangan besar dalam mengatasi masalah sosial yang muncul bersamaan (Giuliani dkk., 2016). Temuan sistematis Zhao dkk. menegaskan bahwa modal sosial berperan krusial dalam meningkatkan resiliensi komunitas melalui mekanisme pembelajaran sosial, aksi kolektif, komunikasi risiko, dan tanggung jawab moral. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pemulihan pasca bencana lebih ditentukan oleh kekuatan jaringan sosial masyarakat dibanding sekadar kapasitas teknis.

Dalam konteks tersebut, rehabilitasi pasca bencana menuntut adanya kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memang banyak mengerahkan teknologi dan mekanisme formal, tetapi masyarakat memiliki modal sosial berupa gotong royong, musyawarah adat. Ketika kebijakan nasional dan daerah tidak terhubung dengan praktik lokal, pemulihan cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan antisipasi kebijakan yang cermat dan terukur agar penguatan rekonsiliasi sosial berbasis kearifan lokal dapat dijadikan model kebijakan rehabilitasi pasca bencana berbasis komunitas yang terintegrasi dalam kerangka nasional penanggulangan bencana.

DESKRIPSI MASALAH

Berdasarkan hasil literatur review terhadap berita di media, jurnal, serta laporan yang terkait dengan Rehabilitasi Pasca Bencana di beberapa daerah, terdapat informasi mengenai faktor yang menjadi tantangan. Tantangan ini bersifat sistemik dan multidimensi, yang menguatkan bahwa Rekonsiliasi Sosial Berbasis Kearifan Lokal perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Laporan dari Masyarakat
- Bukan Laporan dari Masyarakat



LEMAHNYA KOLABORASI LINTAS AKTOR

United Nations Office for Disaster Risk Reduction dalam Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dan community-based disaster recovery sebagai prinsip global pengurangan risiko bencana (UNDRR, 2015). Struktur koordinasi berbasis regulasi harus digarisbawahi dalam manajemen dan administrasi penanggulangan bencana daerah.

Data Sistem Tanggap Bencana (SITABA, 2026) menunjukkan bahwa dari 3.234 kejadian bencana di Indonesia, hanya 24 kejadian yang dilaporkan langsung oleh masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya mekanisme pelibatan warga serta terbatasnya kapasitas respons dalam sistem penanggulangan bencana. BNPB menekankan penanganan pasca bencana harus menjadi bagian dari kolaborasi yang melibatkan lintas aktor bukan sekedar pemulihan fisik. Namun pada kenyataannya, koordinasi lintas sektor ini masih terbatas (BNPB, 2025). Permasalahan ini menyoroti kebutuhan akan sistem koordinasi yang lebih terintegrasi dan responsif (Shoimuna, 2024).

REKONSILIASI SOSIAL BELUM TERLEMBAGAKAN SECARA SISTEMATIS

Bencana Alam dapat dianggap sebagai pengganda kerentanan sosial. Pemerintah, sering dianggap abai dalam melakukan pendekatan sosiologis pada penanggulangan bencana, dengan hanya berfokus pada pembangunan fisik, serapan anggaran dan lainnya (IDN Times, 2025). Sehingga potensi konflik sosial pasca bencana sering tidak terkelola secara sistematis dan sumber daya yang terbatas menyebabkan bantuan terlambat dan kurang optimal dalam pendistribusiannya. Studi Sigarlaki dkk. (2022) menunjukkan bahwa proses penyaluran bantuan pasca banjir di Kota Manado tidak berjalan optimal. Dari 3.018 KK terdampak yang berhak menerima bantuan, hanya 2.030 rumah yang terdaftar sebagai penerima. Ketidaksiesuaian ini diperparah oleh adanya pungutan yang tidak sesuai aturan serta pembagian yang tidak merata, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Trauma kehilangan harta benda membuat masyarakat rentan terhadap isu/hoaks (Gong & Ren, 2025). Jika pemerintah tidak transparan, kolaborasi akan putus karena warga merasa "dimanfaatkan" atau "dikorbankan". Bencana terkadang memicu konflik horizontal terkait pembagian bantuan. Tanpa rekonsiliasi yang baik, kolaborasi antarwarga sendiri akan rentan, sehingga program pemerintah sulit diimplementasikan secara kolektif.



KEARIFAN LOKAL BELUM TERINTEGRASI DALAM DESAIN REHABILITASI

Integrasi pengetahuan lokal meningkatkan keberlanjutan program berbagai disiplin ilmu (Ijatuyi et. al, 2025) termasuk dalam hal rehabilitasi pasca bencana. UNDP dalam panduan Local Governance and Resilience menekankan integrasi nilai budaya dalam desain kebijakan pemulihan (UNDP, 2020). Kebijakan rehabilitasi sering tidak sepenuhnya mempertimbangkan pengetahuan lokal (Sumada, 2017), sehingga solusi yang diterapkan kurang sesuai dengan kondisi sosial-budaya setempat.

Integrasi kearifan lokal terbukti mempercepat pemulihan sosial pasca bencana, seperti ditunjukkan dalam studi di Kabupaten Sigi (Muhamad dkk., 2025). BNPB juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis lokal melalui praktik gotong royong yang berakar pada pranata sosial lokal seperti Meuseuraya di Aceh dan Masohi di Maluku, di mana masyarakat bekerja bersama tanpa imbalan untuk kegiatan sosial dan lingkungan (Nindatu dkk., 2022).

Fenomena solidaritas “warga bantu warga” atau “korban bantu korban” yang viral di media sosial sejatinya merekam praktik sosial yang telah lama mengakar (Mansur, 2026). Pengalaman internasional pun menegaskan hal serupa, seperti konsep Kizuna tentang ikatan sosial (Fujiizu, 2021), Sayotama tentang harmoni manusia-alam (Nagahata, 2022), serta forum komunitas lokal dalam perencanaan kota tahan bencana di Jepang pasca tsunami 2011 (N. Siawsh, et. al, 2021).

KAPASITAS MEDIASI KONFLIK DI TINGKAT DAERAH MASIH TERBATAS

Meskipun UU Nomor 24 Tahun 2007 telah merinci tanggung jawab koordinasi pemerintah dalam pemulihan pascabencana, implementasinya di lapangan sering kali mengalami hambatan serius. Masalah utama muncul ketika terdapat kesenjangan antara data birokrasi BPBD dengan realitas kebutuhan masyarakat, yang memicu penilaian bahwa penanggulangan bencana lambat dan kurang maksimal (Sigarlaki dkk., 2022).

Permasalahan ini bukan sekadar kendala administratif, melainkan ancaman nyata terhadap erosi modal sosial (*social capital*) di tingkat daerah. Ketidakakuratan distribusi bantuan menciptakan kecemburuan sosial dan krisis kepercayaan (*sinisme*) masyarakat terhadap otoritas, yang pada gilirannya melemahkan semangat gotong royong alami yang telah terbangun lama (Ridlo, 2026). Tanpa kapasitas mediasi konflik yang memadai di tingkat lokal, kegagalan koordinasi ini justru mengubah momentum pemulihan menjadi sumber perpecahan baru. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa lemahnya dukungan kolaboratif dan pengabaian terhadap kapasitas lokal akan menghambat keberlanjutan pemulihan pascakrisis secara jangka panjang (Carrasco et al., 2020).

ALTERNATIF SOLUSI

Beberapa alternatif opsi kebijakan berikut sebagai langkah strategis untuk memperkuat rekonsiliasi sosial dan ketahanan masyarakat pasca bencana:

01 COMMUNITY-BASED POST-DISASTER REHABILITATION PROGRAM (CB-PDRP)

Rehabilitasi pasca bencana tidak cukup hanya berfokus pada pemulihan fisik, melainkan juga harus memperkuat kapasitas sosial masyarakat. CB-PDRP menjadi kerangka strategis yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dengan dukungan kebijakan, pendanaan, dan pendampingan teknis dari pemerintah. Melalui pendekatan ini, masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.



Kolaborasi merupakan inti dari CB-PDRP sebagai model rehabilitasi berbasis komunitas. Pemerintah berperan sebagai fasilitator kebijakan, regulator dan penyedia sumber daya; tokoh adat menjaga nilai budaya sekaligus menjadi mediator dalam resolusi konflik; tokoh agama memberikan dukungan moral dan memperkuat solidaritas sosial; pemuda menjadi penggerak aksi kolektif serta inovasi sosial; sementara akademisi dan perguruan tinggi berkontribusi melalui riset, pelatihan, serta layanan pemulihan psikososial seperti trauma healing center. Dukungan juga dapat diperluas melalui pelibatan influencer untuk penguatan literasi publik serta kemitraan dengan platform filantropi digital seperti KitaBisa.com guna mempercepat mobilisasi bantuan secara transparan dan partisipatif. Dengan keterlibatan berbagai aktor ini, rehabilitasi tidak hanya membangun kembali infrastruktur, tetapi juga memperkuat kohesi sosial, meningkatkan ketangguhan komunitas dan memulihkan rasa keadilan, serta membuka ruang bagi integrasi kearifan lokal sebagai mekanisme rekonsiliasi sosial dan pemulihan berkelanjutan. Ketika kebijakan nasional dan daerah terhubung dengan praktik lokal, proses rehabilitasi dapat berjalan lebih inklusif dan berkeadilan, sekaligus mendorong prinsip *build back better* untuk memastikan ketahanan masyarakat menghadapi bencana di masa depan.

02 PENGUATAN KAPASITAS LOKAL UNTUK *DIALOGUE FOR PEACE*

Program *Dialogue for Peace* berfokus pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam mediasi konflik dan dialog sosial sebagai fondasi pemulihan pasca bencana. Penguatan kapasitas ini mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kelembagaan dalam bidang mediasi konflik, fasilitasi dialog sosial, serta komunikasi yang inklusif dan sensitif terhadap konteks lokal. Pemerintah daerah perlu dibekali dengan kompetensi analisis konflik, perumusan kebijakan responsif konflik (*conflict-sensitive governance*), serta mekanisme koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan.



Sementara itu, komunitas lokal perlu diperkuat perannya sebagai agen perdamaian melalui pelatihan mediasi, penguatan jejaring sosial dan peningkatan kapasitas kepemimpinan berbasis nilai-nilai lokal. Pemerintah perlu mewadahi dan melestarikan kearifan lokal seperti Meuseuraya dan Masohi sebagai mekanisme mediasi alami. Dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah dan komunitas, forum dialog yang inklusif dapat terbentuk untuk mencegah eskalasi konflik, mempererat kohesi sosial dan mendukung pemulihan berkelanjutan, sekaligus mengintegrasikan kearifan lokal dalam proses mediasi untuk memperkuat legitimasi kebijakan dan penerimaan masyarakat, sehingga pemulihan pasca bencana berjalan lebih inklusif, berkeadilan dan berorientasi pada ketahanan jangka panjang.

REKOMENDASI



Prioritas kebijakan diarahkan pada institusionalisasi *Community-Based Post-Disaster Rehabilitation Program* (CB-PDRP) sebagai kerangka utama rehabilitasi sosial yang menempatkan masyarakat sebagai aktor kunci pemulihan, dengan dukungan regulasi dan pendanaan daerah yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Secara paralel, penguatan kapasitas *Dialogue for Peace* perlu diintegrasikan melalui pelatihan mediasi konflik, forum dialog inklusif, dan pendekatan *conflict-sensitive governance* guna mencegah eskalasi ketegangan sosial serta memastikan legitimasi dan keberlanjutan kebijakan rehabilitasi. Kombinasi kedua prioritas ini menjadi fondasi strategis untuk membangun kohesi sosial, memperkuat ketahanan komunitas serta mewujudkan pemulihan pasca bencana yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- BNPB Indonesia. (2025). Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Retrieved from Geoportal Data Bencana Indonesia: <https://gis.bnpb.go.id/>
- Giuliani, L., Revez, A., Sparf, J., Jayasena, S., & Faber, M. H. (2016). Social and technological aspects of disaster resilience. *International Journal of Strategic Property Management*, 20(3), 277–290.
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. (2018). World disasters report 2018. <https://www.ifrc.org/document/world-disasters-report-2018>
- Muhamad, H., Abdulah, D. C., Ariani, N., & Afdal, A. (2025). *Community participation and social reconstruction post natural disasters based on local wisdom in Sigi District Central Sulawesi Province*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi*, 9(2), 666–675. <https://doi.org/10.22437/jiituj.v9i2.37009>
- Sigarlaki, N. T., Sambiran, S., & Lambey, T. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KORBAN BANJIR DI KOTA MANADO (Studi di Kecamatan Paal Dua). *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*
- Zhao, G., Hui, X., Zhao, F., Feng, L., Lu, Y., & Zhang, Y. (2025). How does social capital facilitate community disaster resilience? A systematic review. *Frontiers in Environmental Science*, 12, 1496813.